

BAGIAN ANGGARAN 089



LAPORAN KEUANGAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
TAHUN ANGGARAN 2010

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5
MEDAN 20122

BAGIAN ANGGARAN 089



LAPORAN KEUANGAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
TAHUN ANGGARAN 2010

NOMOR : LAP- 269 /PW02/1/2011
TANGGAL : 17 JANUARI 2011

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5
MEDAN 20122

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2010 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

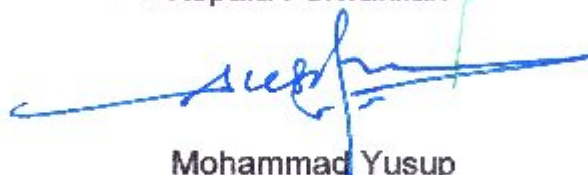
1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara Tahun 2010 adalah sebesar Rp 95.140.717,- sedangkan anggaran penerimaannya tidak ditetapkan dalam DIPA Tahun 2010. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp 19.898.995.460,- atau 93,67 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA dan SKPA TA 2010.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp 106.708.309.476,- dan Kewajiban

sebesar Rp 104.775.836,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sebesar Rp 106.603.533.640,-

3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan teknis, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, serta daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Medan, 17 Januari 2011

Kepala Perwakilan



Mohammad Yusup

NIP 19550403 197911 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vi
Daftar Lampiran	vii
Daftar Singkatan	viii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	ix
Pernyataan Tanggung Jawab	x
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT perbandingan 2010 dan 2009)	4
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2010 dan 2009)	5
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	6
A. Penjelasan Umum	6
A.1. Dasar Hukum	6
A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja	6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.4. Kebijakan Akuntansi	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	16
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Penjelasan Umum Neraca	26
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	27
D. Pengungkapan Penting Lainnya	35
Laporan-laporan Pendukung sesuai <i>Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER- 65 /PB/2010</i>	
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	
• Neraca Percobaan	
Laporan Barang Pengguna	
• Laporan Barang Pengguna Tahunan	
• Laporan Kondisi Barang	
Lampiran Laporan Penggunaan Rekening Pemerintah	

Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

DAFTAR TABEL

- Tabel 1** : Rincian Realisasi PNBP TA 2010
- Tabel 2** : Rincian Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009
- Tabel 3** : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2010
- Tabel 4** : Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009
- Tabel 5** : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010
- Tabel 6** : Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010 dan 2009
- Tabel 7** : Daftar Aset Tetap

DAFTAR GRAFIK

- Grafik 1** : Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009
- Grafik 2** : Komposisi Realisasi PNBPA TA 2010 dan 2009
- Grafik 3** : Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 dan 2009
- Grafik 4** : Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010
- Grafik 5** : Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009
- Grafik 6** : Komposisi Neraca
- Grafik 7** : Perbandingan Aset Tetap TA 2010 dan 2009

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Neraca Percobaan
- Lampiran 2** : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN
- Lampiran 3** : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui BUN
- Lampiran 4** : Laporan Realisasi Anggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan BUN menurut format DIPA
- Lampiran 5** : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN
- Lampiran 6** : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui BUN
- Lampiran 7** : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan Kerja melalui KPPN menurut Program dan Kegiatan

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BM	: Belanja Modal
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP	: Uang Persediaan
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
TUP	: Tambahan Uang Persedisaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN		Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah		
Catatan B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	15
Catatan B.2.1.1	Penerimaan Negara Bukan Pajak	16
Belanja Negara		
Catatan B.2.2	Belanja Negara	18
Catatan B.2.2.1	Belanja	19
NERACA		
ASET		
Aset Lancar		
Catatan C.2.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	24
Catatan C.2.1.2	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	24
Catatan C.2.1.3	Persediaan	24
Aset Tetap		
Catatan C.2.2.1	Tanah	26
Catatan C.2.2.2	Peralatan dan Mesin	27
Catatan C.2.2.3	Gedung dan Bangunan	27
Catatan C.2.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	28
Catatan C.2.2.5	Aset Tetap Lainnya	28
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek		
Catatan C.2.3.1	Uang Muka dari KPPN	28
EKUITAS		
Ekuitas Dana Lancar		
Catatan C.2.4.1	Cadangan Piutang	28
Catatan C.2.4.2	Cadangan Persediaan	29
Ekuitas Dana Investasi		
Catatan C.2.5.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	29



**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA**

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2010 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan disertai Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Medan, 17 Januari 2011

✓ Kepala Perwakilan

Mohammad Yusup

NIP 19550403 197911 1 001

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal.

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2010 s.d 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 95.140.717,00, dan tidak terdapat anggaran Pendapatan Negara dan Hibah selama tahun 2010.

Realisasi Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp 19.898.995.460,00 atau mencapai 93,67 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 19.536.182.910,00 atau 94,01 persen dari anggarannya dan belanja pinjaman luar negeri sebesar Rp 362.812.550,00 atau 78,39 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

Uraian	TA 2010		TA 2009	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	0	95.140.717	0	15.345.098
Belanja Rupiah Murni	20.780.431.000	19.536.182.910	20.892.969.000	19.568.205.010
Belanja Pinjaman LN	462.834.000	362.812.550	0	0

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset sebesar Rp 106.708.309.476,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 220.103.348,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 106.488.206.128,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 104.775.836,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 106.603.533.640,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 115.327.512,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp 106.488.206.128,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

	31-12-2010	31-12-2009	% kenaikan/ (penurunan)
Aset	106.708.309.476	106.188.542.245	0.48
Aset Lancar	220.103.348	239.066.117	(7.93)
Aset Tetap	106.488.206.128	105.949.476.128	0,50
Aset Lainnya	0	0	0
Kewajiban	104.775.836	135.766.602	(22,82)
Kewajiban Jangka Pendek	104.775.836	135.766.602	(22,82)
Ekuitas Dana	106.603.533.640	106.052.775.643	0.62
Ekuitas Dana Lancar	115.327.512	103.299.515	11,64
Ekuitas Dana Investasi	106.488.206.128	105.949.476.128	0.50

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

Laporan Keuangan ini dilengkapi dengan pengungkapan informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

Pendapatan secara Akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Belanja secara Akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Catatan	31 DESEMBER TAHUN 2010				31 DESEMBER TAHUN 2009			
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI THD ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI THD ANGGARAN
A	PENDAPATAN									
	■ Penerimaan Perpajakan		0	0	0	-	0	0	0	-
	■ Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.1	0	95.140.717	95.140.717	-	0	69.826.968	69.826.968	-
	TOTAL PENDAPATAN		0	95.140.717	95.140.717	-	0	69.826.968	69.826.968	-
B B.1	BELANJA	B.2.2.1								
	Rupiah Murni		21.243.265.000	19.898.995.460	(1.344.269.540)	93,67	20.892.969.000	19.568.205.010	(1.324.763.990)	93,66
	■ Belanja Pegawai		11.871.732.000	11.218.374.125	(653.357.875)	94,50	12.570.693.000	11.471.673.557	(1.099.019.443)	91,26
	■ Belanja Barang		8.721.533.000	8.141.891.335	(579.641.665)	93,35	8.052.276.000	7.835.337.709	(216.938.291)	97,31
	■ Belanja Modal		650.000.000	538.730.000	(111.270.000)	82,88	270.000.000	261.193.744	(8.806.256)	96,74
	TOTAL BELANJA		21.243.265.000	19.898.995.460	(1.344.269.540)	93,67	20.892.969.000	19.568.205.010	(1.324.763.990)	93,66

III. N E R A C A

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009
(DALAM RUPIAH)

NAMA PERKIRAAN	Catatan	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
		31-Des-10	31-12-2009	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6
ASET					
ASET LANCAR					
■ Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	-	100.500	(100.500)	-
■ Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2	-	-	-	-
■ Bagian Lancar Tagihan TGR	C.2.1.3	-	5.450.000	(5.450.000)	-
■ Persediaan	C.2.1.4	220.103.348	233.515.617	(13.412.269)	(5,74)
JUMLAH ASET LANCAR		220.103.348	239.066.117	(18.962.769)	(7,93)
ASET TETAP					
■ Tanah	C.2.2.1	65.647.317.195	65.647.317.195	-	-
■ Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	5.401.406.098	5.381.782.098	19.624.000	0,36
■ Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	35.042.323.283	34.523.217.283	519.106.000	1,50
■ Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.2.4	386.632.989	386.632.989	-	-
■ Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	10.526.563	10.526.563	-	-
■ Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.2.6	-	-	-	-
JUMLAH ASET TETAP		106.488.206.128	105.949.476.128	538.730.000	0,50
ASET LAINNYA					
■ Aset Lain-lain	C.2.3	-	-	-	-
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-	-	-
JUMLAH ASET		106.708.309.476	106.188.542.245	519.767.231	0,48
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
■ Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.4.1	88.275.836	101.166.102	(12.890.266)	(12,74)
■ Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.4.2	16.500.000	34.500.000	(18.000.000)	(52,17)
■ Uang Muka dari KPPN	C.2.4.3	-	100.500	(100.500)	#####
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		104.775.836	135.766.602	(30.990.766)	(22,82)
EKUITAS DANA					
EKUITAS DANA LANCAR					
■ Cadangan Piutang	C.2.5.1	-	5.450.000	(5.450.000)	#####
■ Cadangan Persediaan	C.2.5.2	220.103.348	233.515.617	(13.412.269)	(5,74)
■ Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang	C.2.5.3	(104.775.836)	(135.666.102)	30.890.266	(22,77)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR		115.327.512	103.299.515	12.027.997	11,64
EKUITAS DANA INVESTASI					
■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	C.2.6.1	106.488.206.128	105.949.476.128	538.730.000	0,50
■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	C.2.6.2	-	-	-	-
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI		106.488.206.128	105.949.476.128	538.730.000	0,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		106.708.309.476	106.188.542.245	519.767.231	0,48

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2005.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi.

Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Untuk mewujudkan tujuan akhir (*goals*) tersebut di atas, komitmen ini selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai **“Auditor Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya, untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas”**

Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yaitu:

1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan Negara yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN;

2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten;
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang handal bagi presiden/pemerintah;

Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor : Kep-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara posisi 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

- Kepala Perwakilan : Mohammad Yusup
- Kepala Bagian Tata Usaha : Edi Mulia
- Kepala Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat : Samidan Angkasa Wijaya
- Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah : Binsar Sirait
- Kepala Bidang Akuntan Negara : Fatdjeri
- Kepala Bidang Investigasi : Ernadhi Sudarmanto
- Kepala Sub Bagian Prolap : Agust Yulian
- Kepala Sub Bagian Keuangan : Darmawan
- Kepala Sub Bagian : Harsono
- Kepala Sub Bagian Bagian Umum : Gusmah Yuzar

Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2010 sebanyak 223 orang yang dapat diuraikan menurut (1) jabatan dan (2) tingkat pendidikan:

(1) menurut jabatan:

Jabatan	Jumlah	%
Struktural	10 orang	4.5
Fungsional Auditor	168 orang	75.3
Fungsional Analisis Arsiparis	5 orang	2.2
Fungsional Analisis Pranata Komputer	2 orang	0.9
Fungsional Analisis Umum	38 orang	17.1
Jumlah	223 orang	100

(2) menurut tingkat pendidikan:

Pendidikan	Jumlah	%
S. 2	15 orang	6.7
D. IV/ S. 1	117 orang	52.5
D. III/ Sarmud	56 orang	25.1
D.I	1 orang	0.4
SLTA	30 orang	13.5
SD	4 orang	1.8
Jumlah	223 orang	100

Pendapatan

PENDAPATAN

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai PNBPN yang berasal dari pelaksanaan tugas pokoknya. Realisasi pendapatan TA 2010 adalah sebesar Rp 95.140.717,00 berasal dari pendapatan sewa rumah dinas dan pengembalian belanja tahun yang lalu.

Belanja

BELANJA

Realisasi belanja TA 2010 adalah sebesar Rp19.898.995.460,00 atau mencapai 93.67 persen dari anggaran sebesar Rp21.243.265.000,00.

Realisasi belanja Tahun 2010 dibandingkan periode yang sama tahun

sebelumnya sebagai berikut :

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Persen Naik/(Turun)
		Sem II TA 2010	Sem II TA 2009	
51	Belanja Pegawai	11.218.374.125	11.471.673.557	(2,21)
52	Belanja Barang	8.141.891.335	7.835.337.709	3,91
53	Belanja Modal	538.730.000	261.193.744	106,26
	Jumlah	19.898.995.460	19.568.205.010	1,69

Penurunan realisasi belanja pegawai sebesar Rp 253.299.432,00 atau 2,21 persen antara lain disebabkan adanya mutasi dan pensiun pegawai (PNS).

Realisasi belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per program dalam Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Kode Program	Uraian Program	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	%
01.01.09	Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik	14.002.828.000	13.217.885.233	94.39
01.01.10	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	6.590.437.000	6.142.380.227	93.20
01.01.17	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	650.000.000	538.730.000	82.88
Jumlah		21.243.265.000	19.898.995.460	93.67

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp20.780.431.000,00 ditambah SKPA dari Kantor Pusat sebesar Rp462.834.000,00.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LK telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas

dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dibedakan menjadi Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas. **Kas di Bendahara Pengeluaran** merupakan saldo kas/bank yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas Umum Negara pada tanggal neraca. **Kas Lainnya dan Setara Kas** merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dikelola oleh Bendahara Pengeluaran belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, atau harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai

masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Periode waktu perolehan bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,

lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu habis dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

*Ekuitas
Dana*

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas

Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

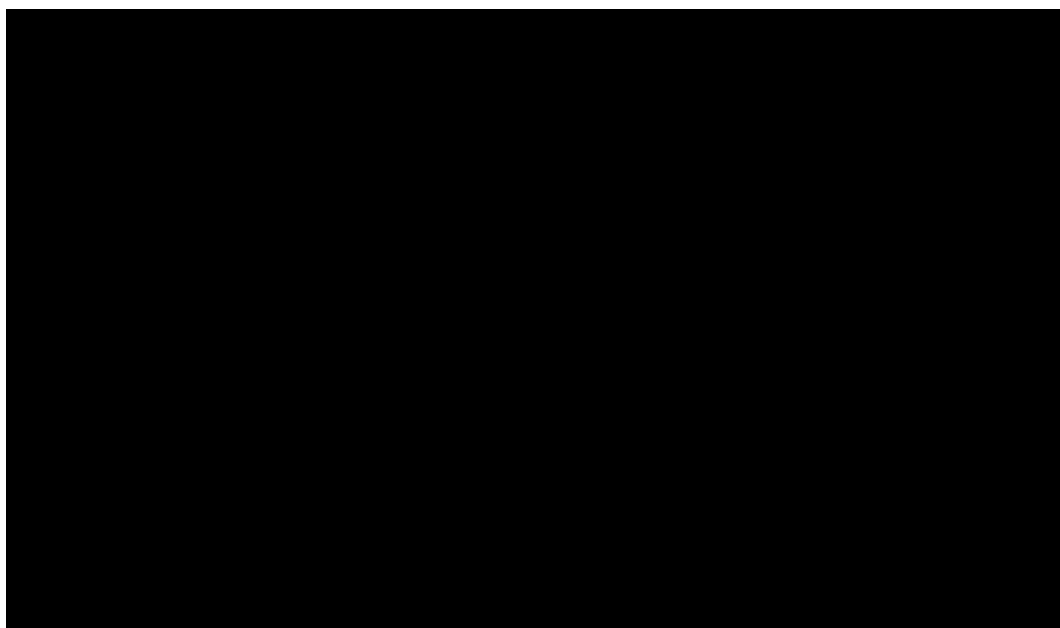
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 sebesar Rp95.140.717,00 yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa PNBP Lainnya. Sementara itu realisasi Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp 19.898.995.460,00 atau 93,67 persen dari anggaran sebesar Rp 21.243.265.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	Rp -	Rp 95.140.717	-
	- Penerimaan Pajak	Rp -	Rp -	-
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp -	Rp 95.140.717	-
	- Penerimaan Hibah	Rp -	Rp -	-
2	Realisasi Belanja Negara	Rp 21.243.265.000	Rp 19.898.995.460	93,67
	- Belanja Rupiah Murni	Rp 20.780.431.000	Rp 19.536.182.910	94,01
	- Belanja Pinjaman LN	Rp 462.834.000	Rp 362.812.550	78,39
	- Belanja Rupiah Pendamping	Rp -	Rp -	-
	- Belanja Hibah	Rp -	Rp -	-

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah**

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 adalah sebesar Rp 95.140.717,00. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

*Realisasi Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp95.140.717,-*



Grafik 1 : Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009

B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berupa **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya**. Realisasi Penerimaan PNBP pada TA 2009 sebesar Rp 95.140.717,00 terdiri dari :

Realisasi PNBP
Rp95.140.717,-

Tabel 1
Rincian Realisasi PNBP TA 2010

Uraian Jenis PNBP	Anggaran	Realisasi	%
➤ Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan		3.600.000	-
➤ Pendapatan Sewa Rumah Dinas	-	19.983.356	-
➤ Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	3.343.242	-
➤ Pendapatan Jasa	-	0	-
➤ Pendapatan Lain-Lain			
▪ Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	16.634.119	-
▪ Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	-	46.130.000	-
▪ Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara	-	5.450.000	-
Jumlah	-	95.140.717	-

Pendapatan Pelunasan Piutang sebesar Rp 5.450.000,00 merupakan cicilan TGR atas mobil Toyota Kijang yang hilang pada tahun 2006 dan telah ditetapkan ganti ruginya dengan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor : KEP-14/K/SU/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pembebanan Ganti Rugi.

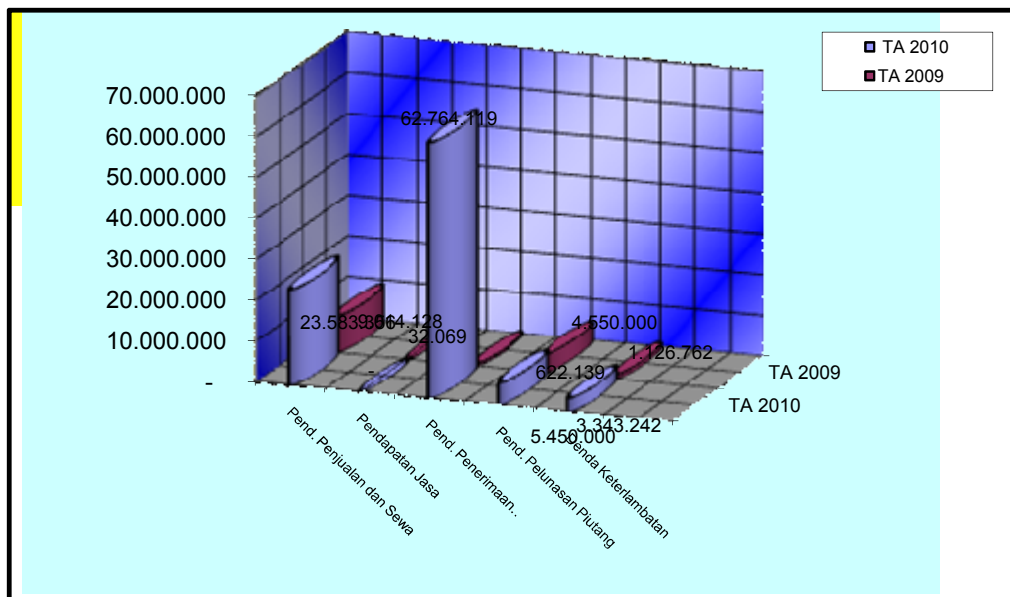
Dibandingkan dengan TA 2009 terdapat kenaikan jumlah realisasi PNBP TA 2010 sebesar Rp 23.313.749,00 atau 36,25 persen.

Perbandingan Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 per jenis PNBP dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Rincian Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009

Uraian Jenis PNBP	Tahun		Kenaikan (Penurunan)	
	2010	2009	Jumlah	%
➤ Pendapatan Penjualan Aset Lainnya	-	5.000.000	(5.000.000)	(100)
➤ Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan	3.600.000	-	3.600.000	100
➤ Pendapatan Sewa Rumah Dinas	19.983.356	22.495.998	(2.512.642)	(11,17)
➤ Pendapatan Sewa Benda –benda Tak Bergerak Lainnya	-	36.000.000	(36.000.000)	(100)
➤ Pendapatan jasa Giro	-	32.069	(32.069)	(100)
➤ Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.343.242	1.126.762	2.216.480	196,71
➤ Pendapatan Lain-lain :				
▪ Pendapatan penerimaan kembali Pegawai Pusat TAYL	16.634.119	622.139	16.011.980	2573,69
▪ Pendapatan pelunasan piutang	5.450.000	4.550.000	900.000	19,78
▪ Pendapatan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL	46.130.000	-	46.130.000	100
▪ Pendapatan Bunga lainnya	-	-	-	-
Jumlah	95.140.717	69.826.968	-	-

Komposisi perbandingan realisasi PNBP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:



Grafik 2 : Komposisi Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009

Dibandingkan dengan TA 2009, terdapat peningkatan jumlah realisasi pendapatan negara dan hibah TA 2010 sebesar Rp 23.313.749,00 atau 36,25 persen. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan pendapatan sewa rumah dinas dan adanya pendapatan pelunasan TGR atas mobil yang hilang.

B.2.2. Belanja Negara

Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).

Realisasi belanja pada TA 2010 bruto sebesar Rp 19.924.361.167,00 atau 93,79 persen dari anggarannya dan pengembalian belanja sebesar Rp25.365.707,00 sehingga realisasi belanja neto sebesar Rp19.898.995.460,00 atau 93,67 persen. Realisasi Belanja tersebut terdiri

Realisasi Belanja Negara
Rp19.898.995.460

dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 19.536.182.910,00 dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 362.812.550,00.

Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2010

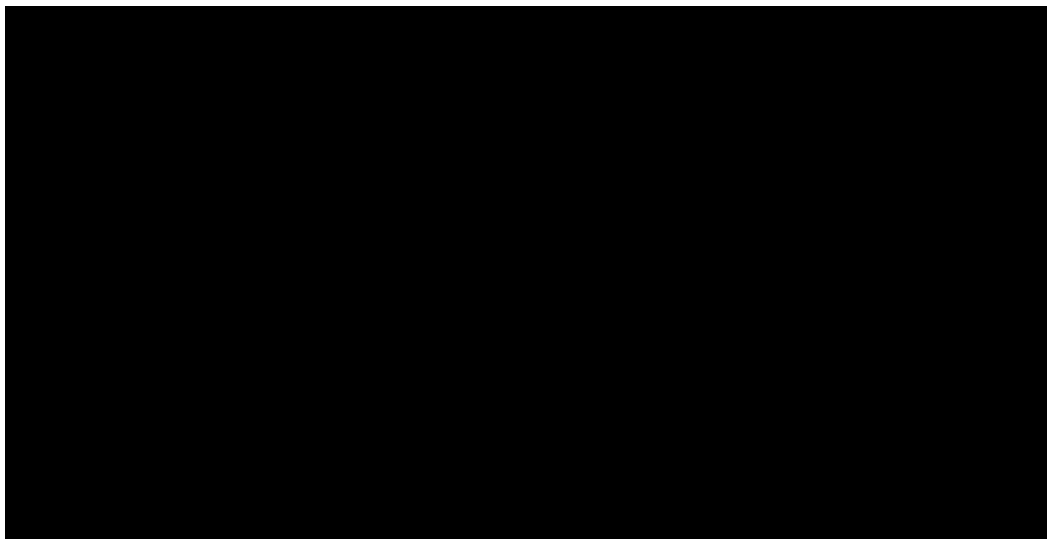
Uraian Belanja	Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Belanja	%
➤ Belanja Rupiah Murni	20.780.431.000	19.536.182.910	94,01
➤ Belanja Pinjaman LN	462.834.000	-	78,39
➤ Belanja RM	-	-	-
J u m l a h	21.243.265.000	19.898.995.460	93,67

Realisasi belanja TA 2010 dan TA 2009 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 4 : Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009

Uraian Belanja	TA 2010	TA 2009	% Kenaikan/ (Penurunan)
➤ Belanja Rupiah Murni	19.536.182.910	19.568.205.010	(0,16)
➤ Belanja Pinjaman LN	362.812.550	-	100
➤ Belanja RM	-	-	-
J u m l a h	19.898.995.460	19.568.205.010	1,69

Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:



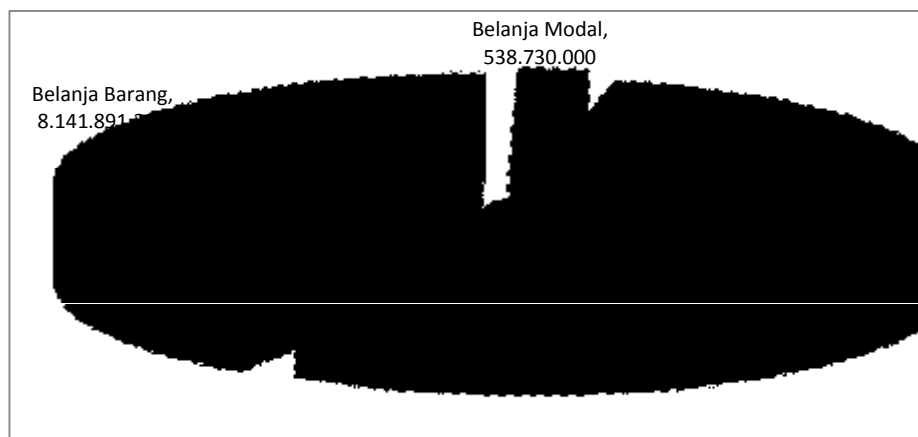
Grafik 3 : Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 dan 2009

B.2.2.1. Belanja

Realisasi Belanja
Rp19.898.995.460

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara pada TA 2010 mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 21.243.265.000,00. Realisasi belanja sampai dengan TA 2010 sebesar Rp 19.898.995.460,00 atau 93,67 persen dari anggarannya. Komposisi realisasi per jenis belanja dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Realisasi Belanja
menurut Jenis Belanja



Grafik 4: Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010

Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan TA 2010 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010

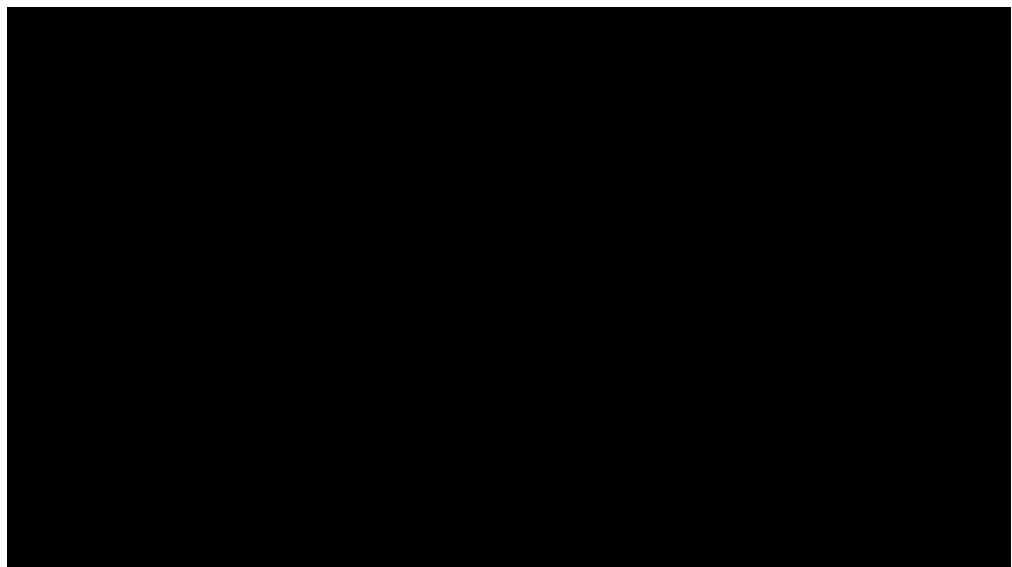
Kode Jenis Blj.	Uraian anggaran Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	(%)
51	Belanja Pegawai	11.871.732.000	11.218.374.125	94,50
52	Belanja Barang	8.721.533.000	8.141.891.335	93,35
53	Belanja Modal	650.000.000	538.730.000	82,88
	Jumlah	21.243.265.000	19.898.995.460	93,67

Realisasi belanja TA 2010 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010 dan 2009

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Persen Naik/ (Turun)
		TA 2010	TA 2009	
51	Belanja Pegawai	11.218.374.125	11.471.673.55	(2,21)
52	Belanja Barang	8.141.891.335	7.835.337.709	3,91
53	Belanja Modal	538.730.000	261.193.744	106,26
	Jumlah	19.898.995.460	19.568.205.01	1,69

Komposisi realisasi Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:



Grafik 5 : Komposisi Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp11.218.374.125

Realisasi belanja pegawai pada TA 2010 bruto adalah sebesar Rp 11.218.389.832,00 atau mencapai 94,50 persen dari anggarannya sebesar Rp 11.871.732.000,00. Jumlah pengembalian belanja pada tahun tersebut adalah Rp 15.707,00 sehingga realisasi belanja pegawai neto menjadi sebesar Rp11.218.374.125,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2009 terdapat penurunan belanja pegawai sebesar Rp 253.299.432,00 atau 2,21 persen yang disebabkan adanya mutasi dan pensiun pegawai

(PNS).

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2010	TA 2009	% Naik/(Turun)
Bel. Gaji Pokok PNS	Rp 7.044.953.260	Rp 7.254.700.240	(2,89)
Bel. Pembulatan Gaji PNS	Rp 171.548	Rp 162.758	5,40
Bel. Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 576.316.360	Rp 597.911.650	(3,61)
Bel. Tunj. Anak PNS	Rp 202.695.616	Rp 209.913.288	(3,44)
Bel. Tunj. Struktural PNS	Rp 143.210.000	Rp 154.750.000	(7,46)
Bel. Tunj. Fungsional PNS	Rp 1.302.225.000	Rp 1.449.140.000	(10,14)
Bel. Tunj. PPh PNS	Rp 210.811.388	Rp 231.715.641	(9,02)
Bel. Tunj. Beras PNS	Rp 496.982.160	Rp 405.369.480	22,60
Bel. Uang Makan PNS	Rp 696.550.000	Rp 520.545.000	33,81
Bel. Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PN	Rp 10.452.000	Rp 9.495.000	10,08
Bel. Tunjangan Umum PNS	Rp 109.110.000	Rp 125.335.000	(12,95)
Bel. Uang Honor Tidak Tetap	Rp -	Rp -	-
Bel. uang lembur	Rp 424.912.500	Rp 512.635.500	(17,11)
Jumlah Belanja Bruto	Rp 11.218.389.832	Rp 11.471.673.557	(2,21)
Pengembalian Belanja	Rp 15.707	Rp -	-
Jumlah Belanja Neto	Rp 11.218.374.125	Rp 11.471.673.557	(2,21)

Belanja Barang
Rp8.141.891.335

Belanja Barang

Realisasi belanja barang pada TA 2010 bruto adalah sebesar Rp8.167.241.335,00 atau mencapai 93,64 persen dari anggarannya sebesar Rp 8.721.533.000,00. Jumlah pengembalian belanja pada tahun tersebut adalah sebesar Rp25.350.000,00 sehingga realisasi belanja barang pada TA 2010 neto menjadi sebesar Rp8.141.891.335,00 atau mencapai 93,64 persen dari anggarannya. Dibandingkan dengan TA 2009 terdapat kenaikan realisasi belanja barang sebesar Rp 306.553.626,00 atau 3,91 persen yang disebabkan kenaikan realisasi belanja perjalanan dinas.

Rincian realisasi Belanja Barang sebagai berikut:

Uraian		TA 2010		TA 2009	% Naik/ (Turun)
Bel. Keperluan Perkantoran	Rp	566.012.450	Rp	774.670.870	(26,94)
Bel. Penambah daya tahan tubuh	Rp	45.290.449	Rp	40.835.653	(10,91)
Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat	Rp	14.687.308	Rp	14.327.950	2,51
Honor Terkait Operasional Satker	Rp	78.655.000	Rp	63.300.000	24,26
Bel. Barang Operasional Lainnya	Rp	280.322.698	Rp	0	100
Bel.Barang Non Operasional Lainnya	Rp	53.573.000	Rp	0	100
Bel. Langganan Daya dan Jasa	Rp	260.380.812	Rp	207.899.900	25,24
Belanja Jasa Profesi	Rp	22.250.000	Rp	0	100
Bel. Jasa Lainnya	Rp	31.200.000	Rp	21.600.000	0,44
Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp	530.321.525	Rp	536.731.972	(1,19)
Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp	257.647.514	Rp	260.098.264	(0,94)
Bel. perjalanan biasa	Rp	5.675.411.029	Rp	5.847.873.100	(2,95)
Belanja perjalanan lainnya	Rp	312.339.550	Rp	0	100
Honor terkait output kegiatan	Rp	39.150.000	Rp	68.000.000	(42,43)
Jumlah Belanja Bruto	Rp	8.167.241.335	Rp	7.835.337.709	4,23
Pengembalian Belanja	Rp	25.350.000	Rp	-	100
Jumlah Belanja Neto	Rp	8.141.891.335	Rp	7.835.337.709	3,91

*Belanja Modal
Rp538.730.000*

Belanja Modal

Realisasi belanja modal pada TA 2010 adalah sebesar Rp 538.730.000,00 atau mencapai 96,74 persen dari anggarannya sebesar Rp650.000.000,00. Dibandingkan dengan TA 2009 terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar Rp 277.536.256,00 atau 106,26 persen disebabkan adanya pengadaan barang melebihi pengadaan di tahun anggaran sebelumnya.

Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

Uraian	TA 2010	TA 2009	% Naik/(Turun)
Bel. Modal Tanah	Rp -	Rp 18.500.000	(100,00)
Bel. Modal Peralatan dan Mesin	Rp 19.624.000	Rp 187.793.744	(89,55)
Bel. Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 519.106.000	Rp 45.000.000	1.053,57
Bel. modal fisik lainnya	Rp -	Rp 9.900.000	(100,00)
Jumlah Belanja Bruto	Rp 538.730.000	Rp 261.193.744	106,26
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja Neto	Rp 538.730.000	Rp 261.193.744	106,26